

KEBIJAKAN PENEMPATAN SISTEM ANTI RUDAL AMERIKA SERIKAT DI KOREA SELATAN

Indryanti Pringgodigdo Joyo Negoro¹
NIM. 1402045017

Abstract

This article explains the reason for the policy of placing the US anti-missile system in South Korea. This research method used is explanative qualitative. The data analysis used is secondary data. The results shows, the US reasons for placing the THAAD anti-missile system in South Korea was driven by two factors: Security instability that occurred in East Asia then made the US want to maintain regional security, especially to build a pattern of amity by maintaining South Korea's national security is an alliance country and makes a joint security system to protect the East Asia region from North Korean missiles. Another reason is indirectly as a espionage program by the US to explore or track information systems of China and North Korean defense equipment. There are opposition from countries in the region such as China, which strongly oppose the THAAD anti-missile system that is stationed in South Korea.

Keywords: *THAAD, South Korea, Regional Security Complex, Realism.*

Pendahuluan

AS lebih mengedepankan militernya untuk mengamankan berbagai kepentingannya yang tidak hanya didalam negara, tetapi juga kepentingan yang berada di negara-negara sekutunya agar tidak terancam. Hal ini menyebabkan AS mengeluarkan kebijakan pertahanan. Kebijakan pertahanan AS di negara sekutu telah lama dibangun yaitu menempatkan pasukan militernya dan menempatkan persenjataannya di negara sekutu seperti Australia dan Jepang. Pendekatan ini juga digunakan yang mendasari negara ini menempatkan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Korea Selatan pada tahun 2017. Penempatan THAAD ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh AS, tetapi penempatan sistem THAAD ini telah terdapat sebelumnya di berbagai negara seperti Ceko dan Polandia pada tahun 2008 (<http://eprints.umm.ac.id/29527/1/jiptumpp-gdl-yacubfarid-31143-2-babi.pdf> diakses pada tanggal 15 Februari 2018), Qatar pada tahun 2012 (<http://www.dsca.mil/major-arms-sales/qatar-terminal-high-altitude-area-defense-thaad> diakses pada tanggal 17 Februari 2018), Uni Emirat Arab pada tahun 2013 dan Guam pada tahun 2013.

Dari semua penempatan-penempatan THAAD, yang menarik adalah penempatan sistem anti rudal di Korea Selatan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya, AS telah memiliki dua sistem anti rudal ini di Jepang pada tahun 2006. AS menempatkan sistem anti rudal yang lebih lengkap sebelumnya yaitu jenis sensor radar peringatan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Surel : indrypjn@gmail.com

dini *X-Band* yang Lebih lanjut memasuki tahun 2001 adanya penurunan produksi CPO Nigeria yang mulai terasa yang disebabkan adanya eksplorasi yang berlebihan dari dikerahkan ke Pangkalan Udara Militer Pasukan Bela Diri Jepang (*The Japan Air Self-Defense Force – JASDF*) (Dewi Permatasari 2016, Vol. 4). Selain itu AS juga menempatkan dua sistem pertahanan tambahan yakni sistem pencegat rudal *Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3)* serta kapal penjelajah USS Shiloh yang dilengkapi dengan sistem pencegat rudal *Standard Missile-3 (SM-3)* ke Pangkalan Angkatan Laut dan Udara AS di Jepang. Penempatan kedua sistem ini dilakukan untuk melindungi wilayah Jepang dan AS sendiri dari ancaman serangan rudal Korea Utara.

Kebijakan sistem anti rudal oleh AS di Korea Selatan ini merupakan implementasi dan bagian integral dari kerjasama *Ballistic Missile Defense (BMD)*. AS membentuk kerjasama BMD dengan negara-negara sekutu khususnya di kawasan Asia Timur seperti Jepang pada tahun 2003 dan Korea Selatan pada tahun 2014 agar AS dapat menyebarkan sistem pertahanannya di kawasan tersebut dan sebagai perlindungan terhadap keamanan sekutu. Kerjasama BMD antara AS dan Korea Selatan disampaikan oleh Komandan Pasukan Khusus AS di Korea Selatan (*United States Forces Korea – USFK*) Jendral Curtis Scaparrotti saat berkunjung ke Seoul.

THAAD yang diciptakan oleh perusahaan pembuat senjata Lockheed Martin ini merupakan sistem pencegat rudal yang bisa berburu dan meledakkan rudal musuh dengan tingkat keberhasilan tinggi. Pencegat ini tidak dilengkapi dengan hulu ledak yang berarti rudal ini hanya menggunakan energi kinetik murni untuk menghancurkan targetnya. Sistem ini mampu meluncurkan rudal anti balistik ke langit untuk menghancurkan rudal musuh baik dari dalam, ataupun dari luar atmosfer bumi tingkat akhir penerbangan. Jenis anti rudal lainnya yang terdapat di Asia Timur khususnya di Jepang, memiliki tujuan yang sama dengan THAAD ini, yaitu untuk menangkal rudal dari negara lain dan melindungi konstelasi keamanan di kawasan.

Kerangka Teori dan Konsep

Teori Regional Security Complex

Menurut Barry Buzan, keamanan regional merupakan bagian dari hubungan keamanan yang secara terarah dan signifikan muncul di antara negara-negara yang berada di dalam sebuah kawasan, sehingga keamanan nasional dari masing-masing negara tidak dapat dianggap terpisah satu sama lain (Barry Buzan 1983, 106). Teori *Regional Security Complex* adalah teori yang menekankan perhatiannya pada signifikansi unsur kawasan dalam memahami dinamika keamanan internasional. Definisi kawasan di sini lebih dilihat dari kacamata keamanan, sehingga suatu wilayah didefinisikan berdasarkan jangkauan pengaruhnya terhadap isu keamanan.

Untuk dapat mendefinisikan keamanan secara regional, Adapun, Buzan menyatakan bahwa terdapat dua pola hubungan di antara negara-negara dalam kawasan, yaitu: (Buzan & Waever 2003, 53)

- a. *Amity* (Persahabatan), yaitu pola-pola hubungan yang dimulai dari pertemanan dan persahabatan sampai kepada pengharapan atau ekspektasi akan terwujudnya perlindungan dan dukungan satu sama lain. Implementasi dari perlindungan dapat dilihat dari terbentuknya aliansi, sedangkan dukungan lebih cenderung kepada pernyataan-pernyataan politik yang mendukung kebijakan lain.

- b. *Enmity* (Permusuhan), yaitu pola-pola hubungan yang dibangun berdasarkan dari rasa saling curiga dan rasa takut. Implementasi dari rasa saling curiga diwujudkan dalam cara pembentukan aliansi tandingan sedangkan wujud dari rasa takut berupa modernisasi pertahanan militer dibandingkan dengan negara rivalnya.

Pola *amity* dan *enmity* ini dapat muncul dan berkembang akibat dari berbagai isu yang tidak dapat dipahami hanya dengan melihat distribusi kekuatan yang ada di antara negara-negara terkait. Hal ini dikarenakan pola *amity* dan *enmity* dapat muncul dan berkembang akibat dari berbagai hal yang bersifat spesifik seperti sengketa perbatasan, kepentingan yang berkaitan dengan etnik tertentu, pengelompokan ideologi dan warisan sejarah lama, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif.

Realisme

Salah satu filsuf Thomas Hobbes dalam *Leviathan* menggambarkan bahwa manusia adalah serigala bagi serigala yang lain. Manusia dalam pemenuhan kepentingannya akan selalu berkonflik satu sama lain. Dengan begitu manusia akan menumpahkan darah manusia lain untuk memenuhi kepentingannya. Namun disisi lain, manusia takut binasa karena keadaan tersebut. Manusia memahami dalam lingkungannya selalu ada yang lebih kuat daripada dirinya, sehingga suatu saat dia akan binasa pula. Oleh karena itu, manusia melakukan kontrak sosial untuk membentuk pengatur masyarakat yang dalam karya Hobbes digambarkan sebagai sebuah raksasa (*leviathan*). Pengatur tersebut adalah yang pada saat ini kita kenal sebagai negara (Jackson & Sorensen 2013, 115)

Thucydides menyimpulkan bahwa bukan agresivitas tetapi ketidakamanan yang menjadi sebab adanya perang. Dasar pemikiran realismenya juga menonjol ketika ia menekankan bahwa dalam menjelaskan politik, *might* lebih penting daripada *right*. Thucydides memberikan empat asumsi. Pertama, sifat manusia pada dasarnya egois dan mementingkan diri sendiri sejauh kepentingan pribadi mengatasi prinsip-prinsip moral. Kedua, kondisi hubungan antarmanusia selalu dalam kondisi anarkis. Ketiga, untuk mencapai keamanan, negara berusaha meningkatkan kekuatan mereka dan terlibat dalam pertimbangan kekuatan untuk tujuan menghalangi agresor potensial, sehingga perang dilancarkan untuk mencegah negara peserta supaya tidak lebih kuat secara militer (Williams, C Michael, 2005).

Keamanan nasional menurut realis, merupakan isu utama dan menempati tempat teratas di samping isu-isu lainnya sehingga aspek militer dan isu-isu politik yang berhubungan dengan masalah keamanan nasional mendominasi perpolitikan dunia. Realis juga memusatkan perhatiannya pada potensi konflik yang ada di antara aktor negara, dalam rangka memperhatikan atau menjaga stabilitas internasional, mengantisipasi kemungkinan kegagalan upaya penjagaan stabilitas, memperhitungkan manfaat dari tindakan paksaan sebagai salah satu cara pemecahan terhadap perselisihan, dan memberikan perlindungan terhadap tindakan pelanggaran wilayah perbatasan.

Dalam asumsi realisme, negara bertindak seperti manusia. Negara mencoba untuk memenuhi kepentingannya menggunakan power yang mereka miliki.

Konsep power cukup luas namun dalam hal ini hanya dibatasi sebagai sebuah kapabilitas negara untuk bertindak. Setiap negara adalah berdaulat (*sovereignty*) dan bisa menentukan arah kebijakannya sendiri-sendiri (*self-determination*). Sehingga teori realis menganggap bahwa negara adalah sebuah entitas tertinggi dalam sistem internasional. Inilah yang disebut sifat anarki dalam hubungan internasional.

Konsep Kerjasama Keamanan

Ide dasar dari adanya kerjasama keamanan (*cooperative security*) adalah bahwa negara-negara bekerjasama untuk menjaga keamanan dan memastikan kepentingan nasional mereka. Di dalam permasalahan ini terdapat norma-norma dasar yang digunakan bagi aktor-aktor ini untuk saling berinteraksi. John Gerard Rugie berpendapat bahwa persetujuan kerjasama itu bergantung kepada beberapa prinsip yang kemudian melandasi hubungan, yang secara spesifik sangat bergantung kepada faktor-faktor tertentu (Andi Meganingratna, 2012)

Kerjasama pertahanan dan keamanan dilakukan negara-negara, selain untuk memenuhi kepentingan nasional negara di bidang pertahanan dan keamanan, kerjasama tersebut bertujuan untuk mencapai stabilitas keamanan nasional negara yang bekerjasama. Keamanan nasional lebih menekankan kepada kemampuan pemerintah dalam melindungi suatu negara dari ancaman dari dalam maupun dari luar sehingga terpenuhinya kondisi yang aman.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif, dimana penulis menjelaskan alasan AS menempatkan sistem anti rudal THAAD di Korea Selatan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil pencarian data melalui internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menggunakan data sekunder, kemudian menggunakan teori untuk menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang penulis teliti.

Hasil Penelitian

Sistem Pertahanan dan Keamanan AS

Pasca serangan 11 September 2001, AS mengevaluasi dan merumuskan kembali strategi keamanan nasionalnya dengan mengeluarkan dokumen *The National Security Strategy of the USA (NSS)* yang terbit pada 18 September 2002. Dalam dokumen tersebut konsep keamanan nasional mengalami perubahan yang besar dan mendasar dengan memasukkan konsep *preemption* yang terfokus pada kemungkinan serangan teroris dan penyebaran senjata pemusnah massal. Konsep *preemption* sendiri mengandung arti inisiatif untuk melakukan aksi ofensif demi melumpuhkan kekuatan musuh sebelum musuh tersebut dapat menyerang.

Tindakan *preemption* sendiri tidak sepenuhnya tepat karena memiliki dampak atau bahaya seperti mendorong negara-negara lain untuk melakukan hal serupa sehingga yang terjadi kemudian adalah ketidakamanan secara internasional. Selain itu kemungkinan terjadinya konflik akan lebih besar karena beberapa negara yang memang sedang dalam keadaan konflik atau sedang dalam keadaan hampir perang akan menganggap bahwa doktrin *preemption* yang dikobarkan AS sebagai

pembenaran untuk menyerang negara lain terlebih dahulu dengan dalih bahwa negara tersebut mengancam keamanan negaranya. Sementara negara-negara yang termasuk ke dalam kategori mengancam kedaulatan Amerika dan dunia internasional,

Kriteria-kriteria *Rogue State* berdasar *US National Security Strategy* adalah sebagai berikut: Negara yang pemerintahannya bertindak opresif, brutal terhadap rakyatnya, serta mengeksploitasi sumber daya nasionalnya demi kepentingan penguasa, bersiap mengabaikan hukum internasional, mengancam negara-negara di sekitarnya. Memiliki senjata pemusnah massal serta teknologi militer yang maju yang digunakan untuk mengancam, ofensif, atau mencapai tujuan agrefif rezim penguasa. Menjadi sponsor terorisme yang bersifat global dan menolak implementasi dan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan memperlihatkan sikap bermusuhan dengan AS.

Tragedi 11 September 2001 yang menewaskan ribuan orang di menara kembar WTC menjadi jalan bagi Amerika untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang agresif. Doktrin keamanan terbaru AS dijelaskan oleh NSS-2002 yang menggarisbawahi kebijakan Amerika secara menyeluruh. NSS terbaru di tahun 2017 merumuskan beberapa hal mengenai sistem dan strategi pertahanan dan keamanan AS di pilarnya yang pertama yaitu *Protect the American People, The Homeland and The American Way of Life* yang berisi, mengamankan perbatasan dan wilayah AS, melawan senjata pemusnah massal dan memiliki tindakan prioritas seperti meningkatkan pertahanan rudal dan mendeteksi senjata pemusnah massal (*National Security Strategy 2017*)

Terkait kriteria-kriteria *Rogue State* yang dibuat oleh AS seperti memiliki senjata pemusnah massal serta teknologi militer yang maju yang digunakan untuk mengancam dan ofensif, kawasan Asia Timur memiliki satu negara yang berkriteria demikian dan mengancam negara aliansi AS di kawasan, sehingga memungkinkan dapat memperburuk konstelasi keamanan di Asia Timur.

Konstelasi Keamanan di Asia Timur

Asia Timur merupakan sub-wilayah Asia di mana luasnya sekitar 11.839.074 km² atau 15 persen dari benua Asia. Asia Timur terletak di antara Rusia di utara dan di selatan negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara. Wilayah ini membentang dari daerah gurun di Asia Tengah hingga di Kepulauan Jepang dan Taiwan di kawasan tepi Pasifik Barat. Negara-negara di kawasan ini meliputi negara Cina, Hong Kong, Jepang, Taiwan Mongolia, Korea Utara dan Korea Selatan, dengan populasi sekitar 1500 juta jiwa dan kepadatan 133 jiwa km² (Wardani, 2009).

Sejak Perang Dunia II berakhir, keamanan di kawasan ini tidak pernah stabil. Ada beberapa isu yang mewarnai keamanan wilayah ini. Pertama sejak tahun 1997 Laut Cina Timur yang diperebutkan oleh Jepang dan Cina, dimana kedua negara saling mengklaim pulau yang tidak berpenghuni tersebut adalah bagian dari wilayah negaranya (Martha Dina Kristina, 2013). Kedua, konflik lainnya terkait Taiwan dengan Cina dan dan Korea Utara dengan Korea Selatan. Pada konflik yang terjadi antara Taiwan dengan Cina, mulanya Cina yang menginginkan Taiwan kembali menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Cina namun ditolak oleh Taiwan karena menganggap bahwa Taiwan sendiri telah menjadi negara independen sejak tahun 1949.

Ketiga, Kepulauan Spratly pernah dua kali menjadi medan pertempuran antara Cina dan Jepang, yakni tahun 1974 dan 1988 (<https://www.dw.com/id/jepang-protes-provokasi-cina/a-19460084> diakses pada tanggal 9 Mei 2018). Dari isu-isu keamanan tersebut terdapat satu isu keamanan yang menjadi permasalahan hangat hingga kini yaitu, program nuklir di kawasan Asia Timur dari kepemilikan nuklir dan misil antar benua *Inter-Continental Ballistic Missile* (ICBM) Korea Utara (Erik Setia, 2016). Korea Utara dapat dikatakan sebagai salah satu negara di kawasan Asia Timur yang konsisten dalam pengembangan teknologi rudal balistik secara terus-menerus. Sejak tahun 1965, Korea Utara telah mengembangkan kapabilitas rudal balistik yang diawali dengan berdirinya *The Hamhung Military Academy*

Dari segala isu-isu keamanan yang terjadi di Asia Timur seperti program nuklir di kawasan Asia Timur dari kepemilikan nuklir dan misil antar benua (*Inter-Continental Ballistic Missile/ICBM*) Korea Utara (Erik Setia, 2016). Korea Utara dapat dikatakan sebagai salah satu negara di kawasan Asia Timur yang konsisten dalam pengembangan teknologi rudal balistik secara terus-menerus. Sejak tahun 1965, Korea Utara telah mengembangkan kapabilitas rudal balistik yang diawali dengan berdirinya *The Hamhung Military Academy* dibawah Kementrian Pertahanan Korea Utara untuk mendukung pengembangan senjata modern, termasuk rudal balistik (Jr Bermudez, 2017)

Alasan Korea Utara mengembangkan senjata nuklir disebabkan penggunaan bom nuklir oleh AS untuk menghancurkan Jepang pada akhir Perang Dunia II. Kebijakan Korea Utara mengembangkan program nuklirnya dengan kata lain adalah untuk peningkatan kapabilitas dalam melindungi wilayahnya. Faktor lain pendorong Korea Utara memulai program rudalnya adalah karena semakin meningkatnya kekuatan militer dan ekonomi dari Korea Selatan.

Keterlibatan AS di Asia Timur

Keterlibatan AS di Asia Timur, dimulai sejak Perang Saudara yang tercetus di China merupakan kesan dari kegagalan Kuomintang dan Komunis dalam mencapai penyelesaian politik. Kedua partai China ini sempat bersatu dalam menghadapi pendudukan Jepang yang dimulai tahun 1937, yaitu selama Perang China-Jepang (1937-1945) yang merupakan bagian Perang Dunia II (<https://nanopdf.com/download/bab-II> diakses pada 28 Mei 2018).

Dalam usaha menyelesaikan konflik ini dimulai dari pertengahan tahun 1946, keputusan yang AS sangat mempengaruhi pertempuran ini. Ketika AS memilih untuk menghentikan untuk memberikan bantuan bala tentara terhadap kerajaan Nasionalis. Misi AS ke China yang merupakan upaya untuk membawa persatuan politik antara Nasionalis dan Komunis sebagai sebagai penyelesaian perang. Selepas AS sampai ke China, AS telah membuat cadangan untuk mengadakan gencatan senjata antara Kuomintang dan Komunis dan mengadakan Sidang Perdamaian Politik (Aisha Bibi, 2015 hal. 2)

Pada masa awal pemerintahan Deng Xiaoping memiliki reformasi ekonomi yang merupakan faktor utama atas kebangkitan China saat ini. Hal ini yang menjadi salah satu alasan AS untuk membuka hubungan dengan China Inisiatif terhadap pembukaan hubungan AS dan China muncul setelah terjadinya pembekuan

hubungan politik antara kedua negara sejak diberlakukannya embargo AS terhadap China, langkah pertama untuk memperbarui hubungan AS dan China dilakukan pada tahun 1971. Inisiasi hubungan kedua negara ini dilakukan karena melihat perkembangan China selama tahun 1971-1972 dimana perdagangan internasional China dan perdagangan dengan AS telah meningkat 20% per-tahun (Aisha Bibi, 2015).

Keterlibatan AS di Asia Timur selanjutnya ialah dengan Jepang. Dalam pembangunan ekonomi Jepang, AS memegang peranan penting dari pasca runtuhnya 2 kota tersebut, sebagaimana AS memfasilitasi kebijakan dan institusi domestik Jepang. Hubungan AS dan Jepang telah memberikan dampak positif terhadap hal tersebut.

Hubungan AS dan Korea Selatan

Sejak Perang Korea berlangsung selama tiga tahun. AS secara aktif membantu dan memberikan pelatihan militer kepada pasukan Korea Selatan. Ini dilakukan untuk membendung pengaruh Komunis yang coba disebar oleh Uni Soviet melalui negara satelitnya Korea Utara. Di era-perang dingin keterlibatan kedua negara masih sangat terlihat dan terkesan fulgar, dan konflik keduanya terkadang irasional dan tidak menggunakan perhitungan untung rugi. Dalam konflik tersebut faktor ideologi menjadi sangat substansial bagi AS dan Uni Soviet (<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle> diakses pada tanggal 13 Mei 2018).

Korea Selatan mendapatkan jaminan dari AS dengan ditandatanganinya ROK-US *Mutual Defense Agreement* pada tahun 1954. Sejak itu, Korea Selatan dan AS banyak kerjasama keamanan yang ditambah sejak diumumkannya *Joint Vision for the Alliance* oleh Barrack Obama dan Lee Myun Bak pada tanggal 16 Juni 2009 di Washington, D.C. Aliansi ini menjanjikan untuk meningkatkan kerjasama globalisasi pertahanan masa depan antar AS dan Korea Selatan (Dewi Permatasari, 2016). Pada tahun 26 Mei 2009, AS juga melakukan kerjasama *Proliferation Security Initiative* (PSI) dengan Korea Selatan yang merupakan upaya secara global untuk menghentikan penyelundupan senjata pemusnah masala tau *Weapon of Mass Destruction* (WMD). AS menginginkan agar Korea Selatan terlibat dalam kerjasama *Ballistic Missile Defense* (BMD) antara AS dan Jepang yang telah terbentuk dari tahun 2006.

Kesepakatan yang terjadi antara AS dan Korea Selatan dalam melakukan latihan gabungan militer digunakan untuk mencegah serta menangkal aktivitas uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara. Adanya instalasi reaktor nuklir yang bertujuan untuk sebagai penelitian sudah dimulai pada tahun 1960, pada saat itu Korea Utara masih menerima bantuan teknik dari Uni Soviet untuk melakukan pengembangan nuklir.

AS dan Korea Selatan kemudian membentuk pakta pertahanan dan keamanan untuk saling melindungi dari musuh yang diyakini berasal dari Korea Utara. Bagi keduanya, Korea Utara memiliki kapasitas pengembangan senjata nuklir yang cukup mengkhawatirkan. Tindakan yang dianggap provokatif dan mengancam bagi Korea Utara dapat memicu ditembakkannya rudal sesuai target yang diinginkan. Sehingga, AS memperkuat pangkalan militernya di Korea Selatan dan mengagendakan latihan militer bersama. Bahkan, pakta pertahanan kedua negara berkembang menjadi

Rencana Aliansi Strategis 2015, dimana dalam keadaan perang pasukan militer Korea Selatan akan berintegrasi dengan pasukan militer AS menjadi *US-Korea Command* (Demeiati Kusumaningrum, 2013).

THAAD di Korea Selatan

Dalam menghadapi potensi ancaman rudal balistik dari Korea Utara di kawasan Asia Timur, AS telah membuat suatu pertahanan rudal balistik (*Ballistic Missile Defense*) sebagai komponen utama untuk perlindungan terhadap pasukan AS yang ditempatkan di seluruh dunia dan juga sebagai perlindungan terhadap sekutu. Jepang merupakan salah satu mitra penting AS dalam pembangunan sistem pertahanan di Asia Timur, pada tahun 2004, AS dan Jepang menandatangani memorandum kerjasama pertahanan rudal balistik, termasuk ketentuan untuk transfer teknologi dan informasi terkait.

BMD juga sebagai komponen utama untuk perlindungan terhadap pasukan AS yang ditempatkan di seluruh dunia, dan sebagai perlindungan terhadap keamanan sekutu (Dewi Permatasari, 2016). AS kemudian mengeluarkan asset-aset BMD dengan mengirimkan dua kapal perusak yang dilengkapi dengan fasilitas persenjataan anti rudal. Pada tahun 2002, AS berhasil melakukan uji coba sistem pertahanan anti rudal yang membuat pemerintah Jepang menetapkan bahwa sistem BMD memiliki kelayakan teknologi tinggi yang sesuai untuk kebijakan pertahanan nasional Jepang. Pemerintah Jepang kemudian memutuskan untuk menyetujui pembangunan sistem pertahanan rudal balistik pada tahun 2003.

AS dan Jepang juga telah bersama-sama mengembangkan generasi terbaru dari sistem rudal pencegat SM-3, yaitu sistem SM-3 Blok IIA yang akan memungkinkan pertahanan dari wilayah yang lebih luas dan terhadap ancaman rudal yang lebih canggih. Sistem SM-3 IIA telah diuji coba pada tahun 2006, dengan demikian kedua negara telah membuat sistem *multi-layered* yang siap untuk melacak rudal balistik dari Korea Utara (Hiroshi & Kazumasa, 2016).

Selain sistem-sistem BMD yang terdapat di Jepang, terdapat juga aset BMD di Korea Selatan yaitu THAAD, yang telah diumumkan pada Juli 2016 bahwa AS dan Korea Selatan akan mengerahkan sistem pertahanan rudal di Korea Selatan untuk melawan meningkatnya ancaman rudal balistik dan nuklir Korea Utara. Sebenarnya, AS telah mengusulkan untuk pemasangan THAAD sebagai sistem pertahanan Korea Selatan sejak tahun 2014, namun ditolak oleh Korea Selatan dikarenakan mahalnya anggaran dana yang dikeluarkan untuk melakukan operasional THAAD dan beberapa pertimbangan masyarakat Korea Selatan sendiri. Namun, pembicaraan secara resmi mengenai THAAD diantara kedua negara baru terjalin kembali pada bulan Februari tahun 2016 pasca uji coba nuklir ke-4 dari pihak Korea Utara di bulan Januari 2016. Setelah serangkaian dialog serta konsultasi terkait kecocokan sistem THAAD sebagai pertahanan Korea Selatan, pada tanggal 7 Juli 2016 presiden Korea Selatan Park Geun Hye mengumumkan secara resmi kepada publik bahwa Korea Selatan akan memasang sistem THAAD.

Keputusan pemasangan sistem THAAD oleh Park Geun Hye sebagai sistem pertahanan Korea Selatan dari ancaman misil balistik Korea Utara bukan tanpa alasan. Pasalnya, berdasarkan survey pada bulan Juli 2016 yang dilakukan oleh Gallup Korea (lembaga survey di Korea Selatan) bahwa 50% responden setuju

dengan kebijakan ini, sedangkan 32% menolak dan 18% tidak peduli. Hal ini menunjukkan bahwa warga Korea Selatan sangat kritis terhadap kebijakan ini meskipun kebijakan ini adalah untuk melindungi warga Korea Selatan sendiri dari ancaman Korea Utara (Adwi Novianto, 2018).

Sistem THAAD akan dipasang di pangkalan Angkatan Udara Korea Selatan yang terletak di Seongju dan berjarak sekitar 200 kilometer dari tenggara Seoul. Wilayah ini juga dipilih karena cukup strategis untuk melindungi kota-kota besar di Korea Selatan seperti Busan, Ulsan, dan Pohang dari serangan rudal Korea Utara. (<http://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/19347/8%29%20BAB%20I%20V.pdf?sequence=8&isAllowed=y> diakses pada tanggal 14 September 2018). THAAD terdiri dalam beberapa bagian diantaranya: Peluncur (*Launchers*), Misil (*Missiles/interceptor*), Kontrol Penembak/pusat kendali (*Fire Control*), Radar dan Alat-alat pendukung (<http://www.fiaeroweb.com/Defense/THAAD.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2018).

Alasan Penempatan Sistem Anti Rudal THAAD Amerika Serikat di Korea Selatan

1. Instabilitas Keamanan Asia Timur

Kawasan Asia Timur merupakan kawasan terpadat di dunia karena memiliki sekitar 40% total penduduk. Asia Timur memiliki negara-negara dengan perkembangan pesat, keunggulan teknologi, hingga memiliki kekuatan nuklir (Wardani, 2009). Dibalik potensi ekonomi yang besar dan deras arus perdagangan di kawasan ini, disebut sebagai negara yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengembangkan teknologi nuklir. Kawasan ini juga masih berada pada keadaan politik yang belum stabil dan masih terdapatnya negara yang masih berperang dengan status gencatan senjata seperti Korea Utara dan Korea Selatan (Haikal Thalib, 2014).

Faktor yang menjadi tanda dalam dinamika kawasan ini adalah pengembangan nuklir sebagai sumber energi dan sebagai sebuah senjata pemusnah masal. Dalam konsep keamanan regional, dijelaskan bahwa keamanan nasional masing-masing negara merupakan hal yang sangat penting untuk dicapai, sehingga masing-masing negara berupaya melakukan berbagai peningkatan pertahanan dan keamanannya. Hal ini menunjukkan bahwa tatanan atau konstelasi keamanan di suatu kawasan dapat mempengaruhi perilaku dan kebijakan luar negeri suatu negara yang mana hal ini juga dianggap sebagai bentuk respon negara dalam menanggapi konstelasi keamanan kawasan yang tidak stabil.

AS memahami dinamika keamanan internasional di kawasan Asia Timur yang tidak stabil ini, sehingga perlunya membangun *regional security complex*. Dalam membangun *regional security complex*, AS membentuk aliansi trilateral dengan Korea Selatan dan Jepang. Kerjasama trilateral AS, Korea Selatan dan Jepang memiliki sejarah panjang dalam urusan kerjasama maritim tertanda awal saat terjadinya perang korea. Bahkan sebelum kerjasama trilateral ini terjalin kerjasama bilateral antar tiga negara ini sudah lebih dulu ada, seperti AS dan Korea Selatan yang telah berhubungan bahkan sebelum Korea Selatan berdiri sebagai negara.

Kerjasama trilateral antara AS, Jepang dan Korea bergerak dibidang keamanan. Kerjasama trilateral di bidang militer dan keamanan ini merupakan tindak lanjut dari ketegangan di kawasan Asia Timur yang disebabkan oleh Korea Utara yang mengembangkan program nuklir.

Pola *enmity* yang terdapat di kawasan yang salah satunya yang terbentuk dari Cina terkait konflik Laut Cina Selatan sangat berdampak tidak baik bagi aliansi AS di Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang dan Taiwan. Kawasan Laut Cina Selatan merupakan jalur yang sangat vital bagi negara-negara industrialisasi Asia Timur. Berbagai pelayaran melewati kawasan ini karena sebagai jalur utama transportasi laut pengangkut minyak dari Timur Tengah ke Asia Timur. Adanya klaim Cina atas Laut Cina Selatan ini sehingga memiliki konflik yang berupa perselisihan dan ketegangan, banyak pihak yang dirugikan termasuk Korea Selatan, Jepang dan AS. Taiwan pun turut merasa terancam dan menuntut atas Laut Cina Selatan berdasarkan sejarah, karena Taiwan merupakan negara yang memisahkan diri dari Cina.

Konflik selanjutnya di Asia Timur adalah permasalahan Semenanjung Korea yang merupakan salah satu aspek penting dalam kompleksitas keamanan di kawasan. Program nuklir Korea Utara yang banyak menimbulkan kecemasan di kawasan. Pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan salah satu cara dan upaya maneuver politik untuk meningkatkan posisi tawar di dunia internasional, khususnya terhadap AS dan negara-negara aliansinya di Asia Timur.

Dalam konteks ini, kompleksitas keamanan kawasan berfokus pada unsur-unsur penting berupa kedekatan geografis dan polaritas kekuatan yang diperlihatkan melalui pola *amity* (persahabatan) dan *enmity* (permusuhan). Kedekatan geografis merupakan tempat di mana hubungan keamanan antanegara saling memiliki keterikatan. Ancaman akan terasa semakin besar karena faktor kedekatan jarak. Di Asia Timur, letak geografis Cina, Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang sangat dekat. Posisi perbatasan ini menjadi tempat yang sangat potensial untuk terjadinya konflik bersenjata. Selain kekhawatiran dan rasa takut akan ancaman serangan dari negara lain, minimnya kerja sama keamanan antarnegara juga menjadikan keamanan kawasan semakin kompleks.

Pola persahabatan atau aliansi trilateral antara AS, Korea Selatan dan Jepang juga permusuhan ketiga negara terhadap Korea Utara berujung pada hubungan kedekatan negara yang berimplikasi terhadap persepsi ancaman. Pola persahabatan dan permusuhan ini memicu keterlibatan pihak eksternal, yakni AS. Pola *amity* dan *enmity* menyebabkan terjadinya pola permusuhan yang tercipta antar negara, sehingga masing-masing negara berupaya mengembangkan kekuatannya. Dalam kondisi tersebut, aliansi militer AS dengan Jepang dan Korea Selatan semakin memperkuat kekuatan militer masing-masing negara di kawasan, kecuali Korea Utara.

Korea Utara mengalami kesulitan untuk menjalin aliansi dengan negara lain ataupun meningkatkan kekuatannya sehingga ia meningkatkan kemampuan nuklir sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan nasional. Strategi pengembangan nuklir dinilai memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan

kekuatan. Bagi Korea Utara, pengembangan nuklir dan peluru kendali merupakan strategi penangkalan yang lebih efektif dari sistem persenjataan lainnya. Korea Utara senantiasa keamanan kawasan yang kompleks membahayakan keamanannya sehingga ia mengembangkan senjata nuklir untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan serta mengimbangi keunggulan militer negara-negara lainnya di Asia Timur.

Pemerintahan AS di bawah Ronald Reagan memberi label kepada Korea Utara sebagai rezim teroris, yang kemudian berubah menjadi *rogue state* AS juga menganggap Korea Utara tidak hanya merupakan ancaman militer bagi Korea Selatan melainkan ancaman militer tidak langsung terhadap Jepang, akan tetapi dengan rudal dan pengembangan senjata nuklirnya itu Korea Utara juga mengancam keamanan global, ini yang menyebabkan AS mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan nuklir Korea utara. AS bersama Korea Selatan haruslah tetap dipertahankan sebagai alat untuk menangkal Korea Utara dan menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea agar tidak mengancam stabilitas keamanan global.

AS percaya, Korea Utara memiliki kemampuan untuk menempatkan kepala nuklir atau hulu ledak pada rudal balistik *KN-08* dan akan menembakkan ke daratan AS. Dengan adanya ancaman rudal dari Korea Utara tersebut, menurut Deputi Direktur Urusan Politik-Militer wilayah Asia di Departemen Pertahan AS David Stiwell, mengatakan bahwa kondisi ini akhirnya telah menciptakan suatu kebutuhan bagi sistem pertahanan anti rudal sebagai perlindungan terhadap wilayah sekutu, pasukan AS serta wilayah AS sendiri.

Pada akhirnya, pengembangan senjata nuklir Korea Utara telah membuat keamanan di kawasan Asia Timur semakin kompleks. Pengembangan nuklir bisa menimbulkan reaksi berantai yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan. Upaya Korea Utara untuk mempertahankan program nuklirnya bisa memicu perlombaan senjata di Asia Timur. Pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut juga bisa menjadi pembenaran bagi Korea Selatan dan Jepang untuk mengembangkan senjata nuklir sebagai bagian dari upaya meningkatkan pertahanan dan kapabilitas nuklir mereka.

Menanggapi ketidakstabilan keamanan di kawasan Asia Timur, maka masing-masing negara memiliki strategi kebijakan luar negerinya yang digunakan untuk mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman dan juga sebagai upaya negara tersebut untuk memperoleh keamanan nasional yang diinginkan. Kebijakan luar negeri ini tentu mewakili sejumlah kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh masing-masing negara, namun setiap negara di kawasan Asia Timur memiliki kepentingan-kepentingan nasional yang berbeda, sehingga akan sangat mudah kebijakan luar negeri yang diterapkan suatu negara justru bersinggungan dengan kepentingan nasional negara lain. Dalam hal ini, penulis ini meneliti alasan kebijakan penempatan THAAD yang diterapkan oleh AS sebagai strategi kebijakan pertahanan untuk melindungi konstelasi keamanan kawasan Asia Timur.

2. Penggalan Informasi oleh THAAD

Alasan lain dari AS menempatkan sistem THAAD di Korea Selatan ini juga dikarenakan radar yang terkandung di dalam THAAD tersebut. Kemungkinan radar yang dikandung dalam THAAD ini dapat melacak informasi persenjataan negara-negara di Asia Timur khususnya Cina, dikarenakan pertumbuhan ekonomi Cina yang dianggap menjadi ancaman baru tidak hanya bagi AS tetapi juga bagi Korea Selatan dan Jepang.

Permasalahan ini merupakan kekuatan ekonomi yang akan menunjang perkembangan militer dan modernisasi sistem persenjataan Cina. Didukung dengan pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan militer berjalan beriringan. Peningkatan kapabilitas militer tersebut merupakan bentuk modernisasi yang dilakukan dengan meningkatkan anggaran belanja dan fokus pembaruan alutsista dan sistem persenjataan. Perkembangan militer Cina yang dikhawatirkan akan menjadi pesaing strategis AS dalam upaya melakukan dominasi telah membuat AS selalu mewaspadai kebijakan politik dan keamanan yang dilakukan oleh Cina (Najeri Al-Syahrin, 2018).

Penempatan sistem THAAD ini tidak menutup kemungkinan merupakan program spionase secara tidak langsung yang dilakukan oleh AS. THAAD ini dilengkapi dengan radar terbaik yaitu *Army/Navy Transportable Radar Surveillance* (AN/TPY-2). Radar ini merupakan produksi dari perusahaan produsen lokal Amerika yaitu Raytheon.

Radar ini menyediakan jejak sensor krusial dari rudal dalam dorongan. Dalam mode ini, sensor diarahkan ke luar untuk meningkatkan jangkauan radar untuk mendeteksi peluncuran rudal ke wilayah yang lebih luas. Dari lokasi-lokasi berbasis ke depan ini, TPY-2 mampu mendeteksi dan melacak rudal dalam fase awal dan dorongan awal mereka, menentukan informasi seperti kecepatan dan lintasannya, hal ini yang menjadi alasan terpenting mengapa AS menempatkan THAAD di Korea Selatan, karena radar tersebut dapat melacak informasi kepemilikan senjata dari Korea Utara maupun Cina, sehingga dapat menjadi kelemahan sebuah negara yang dilacak.

THAAD hingga kini belum mampu memenuhi kebutuhan *regional security* di Asia Timur. Karena kembali terhadap tujuan utama ditematkannya THAAD di Korea Selatan ini adalah untuk menangkal ancaman nuklir Korea Utara. Hingga setelah disepakatinya penempatan THAAD ini, Korea Utara tetap melangsungkan uji coba nuklir. Namun setelah tibanya sistem anti rudal THAAD ini di Korea Selatan, tidak pernah lagi berlangsungnya uji coba nuklir oleh Korea Utara. Korea Utara hingga saat ini masih sulit diajak bekerjasama dalam hubungan antar negara mengenai keamanan di kawasan.

Selama ini, perjanjian dan kesepakatan dalam kerjasama yang sudah dilakukan untuk meredam program nuklir Korea Utara masih tidak efektif dan Korea Utara tetap menimbulkan keresahan bagi Korea Selatan dan Jepang khususnya karena uji coba nuklir yang diluncurkan Korea Utara pasca kebijakan penempatan THAAD berlangsung di kawasan. Adanya penempatan sistem THAAD ini sebagai bentuk sistem keamanan kawasan bersama, diharapkan dapat menangkal ancaman rudal

dari Korea Utara walaupun sistem anti rudal tersebut belum pernah menangkal satu rudal pun di kawasan Asia Timur.

Kesimpulan

Rencana program penempatan sistem anti rudal jenis THAAD merupakan bagian integral dari program *Ballistic Missile Defense* (BMD). Program tersebut merupakan program AS untuk membentuk kerjasama BMD dengan negara-negara sekutu khususnya di kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea dengan tujuan agar AS dapat menyebarkan sistem pertahanannya di kawasan tersebut dan sebagai perlindungan terhadap keamanan sekutu. Dalam kebijakan penempatan sistem anti rudal THAAD oleh AS di Korea Selatan ini dapat disimpulkan beberapa hal pokok.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini alasan AS menempatkan sistem anti rudal THAAD di Korea Selatan didorong oleh dua faktor yaitu : Instabilitas keamanan yang terjadi di Asia Timur kemudian membuat AS ingin menjaga keamanan kawasan terutama untuk membangun pola *amity* (persahabatan) dengan menjaga keamanan nasional Korea Selatan yang merupakan negara aliansinya dan membuat sistem keamanan bersama untuk menjaga kawasan Asia Timur dari rudal Korea Utara.

Alasan lainnya yaitu secara tidak langsung sebagai program spionase oleh AS untuk menggali/melacak sistem informasi alutsista kepemilikan Cina dan Korea Utara. Adanya pertentangan dari negara di kawasan seperti Cina, yang menentang keras terkait sistem anti rudal jenis THAAD yang ditempatkan di Korea Selatan. Menurut Cina dengan adanya THAAD yang memiliki radar AN-TPY/2 di kawasan Asia Timur, AS dan Korea Selatan dapat secara langsung melacak sumber informasi mengenai persenjataan di Cina.

Daftar Pustaka

Buku

- Buzan, Barry, 1991. *People States and Fear*, Harvester Wheatsheaf : Cambridge.
- _____ & Ole Waefer, 2003. *Regions and Power: The Structure of International Security*. Oxford: Cambridge University Press.
- Dosch, John. 2004. “*The United States in the Asia Pacific*”, hal. 17-34 in Michael K Connors, Remy Davidson, Jorn Dosch (eds), *The New Global Politics of the Asia-Pacific*.
- Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terj.Dadan Suryadipura, Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Jurnal

- Aisha, Bibi. 2015. *Sejarah Tercetusnya Perang Saudara di China (1946-1949)*. Hal.2
- Dewi, Permatasari. 2016. *Penolakan Korea Selatan Untuk Bergabung Ke Dalam Sistem Pertahanan Rudal Amerika Serikat Di Asia Timur*. Samarinda.

Erik, Setia Pratama. 2016. *Kepentingan Amerika Serikat Dalam Melakukan Pivot to Asia di Kawasan Asia Timur*. Diploma thesis, Universitas Andalas.

M. Najeri Al-Syahrin. 2018. *Kompleksitas Keamanan Kawasan dan Tantangan Kerjasama Keamanan Asia Timur*” *Journal of International Studies* Vol. 1 No. 1 Juni 2018. Samarinda

Situs Web

About the THAAD System terdapat di <http://www.fiaeroweb.com/Defense/THAAD.html>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2018

Hideaki. K. Hiroshi. T dan Kazumasa. K, *Japan’s Missile Defense : Diplomatic and Security Policies In a Changing Strategic Encironmen*” hal. 55 terdapat di <http://www.jiia.or.jp/en/pdf/policyreport/pr200703-jmd.pdf> diakses pada tanggal 17 April 2018

Martha Dina Kristina “*Analisis Pengaruh Sengketa Laut Cina Timur Terhadap Hubungan Diplomasi Jepang-Cina*”2013 terdapat di http://www.academia.edu/13321475/analisis_pengaruh_sengketa_laut_Cina_timur_terhadap_hubungan_diplomasi_jepang-Cina diakses pada tanggal 8 Mei 2018

Michael C. Williams “*The Realist Tradition and The Limits of International Relations*”, Cambridge University. Tahun 2005 terdapat di <https://books.google.co.id/books.id> diakses pada tanggal 28 Mei 2018

Penempatan THAAD di Ceko dan Polandia terdapat di <http://eprints.umm.ac.id/29527/1/jiptummpp-gdl-yacubfarid-31143-2-babi.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2018

Penempatan THAAD di THAAD di Qatar terdapat di <http://www.dsca.mil/major-arms-sales/qatar-terminal-high-altitude-area-defense-thaad>. Diakses pada tanggal 17 Februari 2018